

**PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN
DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH,
BELANJA MODAL, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
(Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera
Tahun Anggaran 2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

**AHMAT SAIFUDIN
B 200160311**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA,

(Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera
Tahun Anggaran 2018)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

AHMAT SAIFUDIN

B 200160311

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Nger Sasongko, S.E., Akt., M.Si.

NIK/NIDN.657/0612056501

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera
Tahun Anggaran 2018)

Yang ditulis oleh:

AHMAT SAIFUDIN
B200160311

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 12 Februari 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

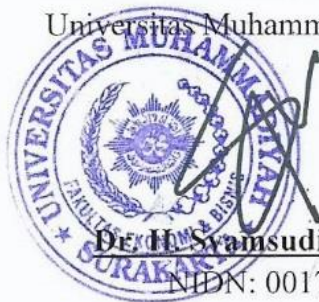
1. Dr. Noer Sasongko, S.E., Akt., M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Wahyono, M. Ak., Akt
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Eko Sugiyanto, S.E., M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. H. Syamsudin, S.E., M.M

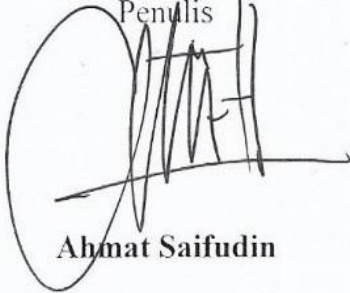
NIDN: 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta 21 Januari 2020

Penulis

Ahmat Saifudin

**PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH,
TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
LEVERAGE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
(Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera
Tahun Anggaran 2018)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 143 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera, sedangkan ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018.

Kata Kunci: Ukuran Daerah, Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah, Belanja Modal, Leverage, EKPPD.

Abstract

The purpose of study to analyze the effect of regional size, the level of regional wealth, the level of regional dependence, capital expenditure, and leverage on the performance of regional governments and cities in Sumatra Island in the 2018 fiscal year. The sampling technique uses a purposive sampling method. The number of samples in this study were 143 regencies and cities in Sumatra Island in fiscal year 2018. Data analysis used multiple linear regression to test and prove the research hypothesis. The results of this study indicate the level of regional wealth affects the performance of district / city local governments throughout Sumatra, while the size of the region, the level of regional dependence, capital expenditure, and leverage do not affect the performance of district / city governments throughout Sumatra Island in the 2018 fiscal year .

Keyword: Regional Size, Regional Wealth, Regional Dependency, Capital Expenditures, Leverage, EKPPD.

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah suatu bentuk tata pemerintahan dimana bentuk kewenangan dan kekuasaan tidak lagi terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Dalam kegiatan pemerintahannya, Indonesia menerapkan

sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 lalu, yang didasarkan dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah” dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Tujuan diterapkannya sistem desentralisasi ini adalah kelak pemerintah daerah dapat membiayai pembangunannya dan dapat melayani publik dengan baik secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Alasan lain diterapkannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab. Adapun salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah menyediakan informasi keuangan yang baik dan komprehensif kepada masyarakat secara luas termasuk informasi laporan keuangan daerah, karena masyarakat merupakan pengguna utama laporan keuangan, dan secara tidak langsung masyarakatlah yang memberikan kekuasaan/mandat kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Dengan penyediaan laporan keuangan tersebut diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah dan dapat menanggapi serta mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam laporan keuangan daerah tersebut.

Pengukuran kinerja perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah daerah, memperbaiki pengendalian manajemen, dan menciptakan transparansi serta akuntabilitas, yang tujuan tersebut dicapai guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja pemerintah daerah juga didasarkan pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang

“Pemerintahan Daerah” selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemerintah daerah, juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat” menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA se-PULAU SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2018”**.

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan analisis data menggunakan prosedur statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Kinerja merupakan gambaran hasil atau capaian dari suatu kegiatan yang telah dilakukan, berarti kinerja pemerintah daerah adalah suatu gambaran dari hasil/pencapaian atas berbagai kegiatan dan aktivitas yang telah dikerjakan. Penilaian kinerja pemerintah daerah didapatkan dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari Keputusan Kementrian Dalam Negeri nomor 100-53 tahun 2018.

2.2.2. Ukuran Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda dalam neraca (Noviyanti, Kiswanto, 2016). Dalam penelitian ini Ukuran Daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan menggunakan rumus Logaritma Natural (\ln) untuk menghindari data-data yang ekstrim.

2.2.3. Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Pendapatan asli daerah dari suatu daerah tinggi maka akan mempermudah kinerja dan transaksi yang akan dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mengukur tingkat kekayaan pemerintah daerah, penelitian ini membandingkan PAD dengan total pendapatan.

2.2.4. Ketergantungan Daerah

Tingkat ketergantungan adalah seberapa besar bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mustikarini dan Fitria (2012), menyatakan cara pengukurannya yaitu tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan.

2.2.5. Belanja Modal

Kementrian keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Belanja modal dihitung dengan membandingkan antara belanja modal dengan total realisasi belanja.

2.2.6. *Leverage*

Leverage adalah seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya kepada pihak eksternal atau kreditur. *Debt Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Untuk menghitung

Leverage yaitu dengan membandingkan total utang dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah.

2.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan ketentuan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih memiliki semua data lengkap meliputi : skor kinerja, neraca untuk mendapatkan total aset dan total utang, Laporan realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, belanja modal dan total realisasi anggaran pendapatan.

2.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis meliputi analisis regresi linier berganda, Uji F, Uji t, dan Uji koefisien determinasi (R^2). Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Bentuk persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 UD + \beta_2 KYD + \beta_3 KTD + \beta_4 BM + \beta_5 LV + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana :

KKPD : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Variabel Independen

UD : Ukuran Daerah

KYD : Kekayaan Daerah

KTD : Ketergantungan Daerah

BM : Belanja Modal

LV : Leverage

ε : Error Term

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 147 pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2018. Atas dasar

penentuan pengambilan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti memperoleh sampel akhir sebanyak 143 pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.2. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan menggunakan tes one sampel *Kolmogrov-Smirnov*.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Kolmogrov-Smirnov</i>	<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	<i>p-value</i>	Keterangan
<i>Undstandardized Residual</i>	1,014	0,255	p>0,05	Data berdistribusi normal

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Pada tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* adalah 1,014 dengan tingkat signifikansi 0,255 sehingga semua variabel lebih besar nilainya dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

3.3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
UD	0,439	2,276	Tidak terjadi Multikolinieritas
KYD	0,697	1,435	Tidak terjadi Multikolinieritas
KTD	0,578	1,731	Tidak terjadi Multikolinieritas
BM	0,983	1,017	Tidak terjadi Multikolinieritas
LV	0,981	1,019	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Dari Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%) dan nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$), artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada gejala multikolinieritas.

3.4. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Spearman's rho* untuk menganalisis uji heterokedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
UD	0,812	$P > 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
KYD	0,544	$P > 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
KTD	0,743	$P > 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
BM	0,749	$P > 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
LV	0,301	$P > 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Dari hasil perhitungan di atas semua variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 ($p > 0,05$) yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas dalam regresi ini.

3.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). OLS adalah metode regresi yang tujuannya untuk meminimalkan kesalahan (error) kuadrat. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan *leverage* sebagai variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Sig.
(Constan)	4,578	2,709	0,008
UD	-0,056	-0,980	0,329
KYD	1,232	2,751	0,007
KTD	-0,402	-1,508	0,134
BM	0,013	0,036	0,971
LV	-1,790	-0,114	0,171

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KKPD} = 4,578 - 0,056 \text{ UD} + 1,232 \text{ KYD} - 0,402 \text{ KTD} + 0,013 \text{ BM} - 1,790 \text{ LV}$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa:

- a) Nilai Konstanta (α) = 4,578

Nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 4,578 dengan nilai positif, hal ini berarti variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan leverage diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tingkat kinerja sebesar 4,578.

- b) Nilai Koefisien Ukuran Daerah = -0,056

Besarnya koefisien ukuran daerah sebesar -0,056 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran daerah sebesar 1 kali maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkurang atau menurun sebesar 0,056 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

- c) Nilai Koefisien Tingkat Kekayaan Daerah = 1,232

Nilai koefisien Tingkat Kekayaan Daerah menunjukkan nilai sebesar 1,232 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan kekayaan daerah sebesar 1 kali maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 1,232 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

- d) Nilai Koefisien Tingkat Ketergantungan daerah = -0,402
 Nilai koefisien ketergantungan daerah sebesar -0,402 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan ketergantungan daerah sebesar 1 kali maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,402 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- e) Nilai Koefisien Belanja Modal = 0,013
 Nilai koefisien belanja modal menunjukkan nilai sebesar 0,013 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan belanja modal sebesar 1 kali maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat/naik sebesar 0,013 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- f) Nilai Koefisien Leverage = -1,790
 Nilai koefisien leverage pada uji hipotesis ini menunjukkan hasil sebesar -1,790 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan leverage sebesar 1 kali maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 1,790 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

3.6. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Variabel dependen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dimana H_a diterima.

Tabel 5. Hasil Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	Kriteria	t-hitung	Sig	Keterangan
UD	$P < 0,05$	-0,980	0,329	H_1 ditolak
KYD	$P < 0,05$	2,751	0,007	H_2 diterima
KTD	$P < 0,05$	-1,508	0,134	H_3 ditolak
BM	$P < 0,05$	0,036	0,971	H_4 ditolak
LV	$P < 0,05$	-0,114	0,171	H_5 ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Hipotesis kesatu yang diajukan peneliti menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ke-1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,329 atau

lebih dari 0,05 ($p < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan Ukuran Daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.

Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti menunjukkan kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ke-2 menunjukkan nilai signifikansi 0,007 atau kurang dari 0,05 ($p < 0,05$). Hasil tersebut berarti kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

Hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ke-3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,134 atau lebih besar dari 0,05 ($p < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Hipotesis keempat yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ke-4 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,971 atau lebih besar dari 0,05 ($p < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak.

Hipotesis kelima yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ke-5 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,171 yaitu lebih besar dari 0,05 ($p < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak.

3.7. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ dimana Hipotesis diterima.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Variabel	Kriteria	Sig	Kesimpulan
UD, KYD, KTD, BM, LV	$P < 0,05$	0,043	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil Uji F memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,043 atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

3.8. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel terkait. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari nilai *Adjusted R^2* .

Tabel 7. Hasil Uji Adjusted R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,281	0,079	0,046	0,2456328

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,046 (4,6%). Hal ini berarti bahwa variabel kinerja keuangan dijelaskan oleh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan *leverage* sebesar 4,6%, sedangkan sisanya 95,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

3.9. Pembahasan

3.9.1. Hubungan Ukuran Daerah Terhadap Skor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ukuran daerah dalam penelitian ini dihitung dan diukur dengan menggunakan rumus Logaritma natural (Ln) dari total aset tiap-tiap

daerah. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran daerah tidak mempengaruhi skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018.

Ukuran Daerah dalam penelitian ini tidak mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik atau buruk, karena pada praktiknya pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik tidak selalu membutuhkan ukuran daerah yang besar pula, melainkan membutuhkan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik dan teratur. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ukuran daerah yang kecil tetapi dapat mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahannya dengan baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harumiati dan Payamta (2014) yang menghasilkan ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asri Widiarti (2018) yang menyatakan bahwa variabel ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dimana ukuran daerah menunjukkan seberapa besar daerah tersebut yang ditunjukkan dengan total aset yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah kabupaten dan kota. Artinya semakin besar total aset yang dimiliki oleh daerah, semakin baik pula kinerja keuangan yang harus dilakukan.

3.9.2. Hubungan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Skor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tingkat kekayaan daerah pada penelitian ini diukur dengan membandingkan antara total PAD dengan total pendapatan dari tiap-tiap daerah. Hasil yang diperoleh dari uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi

tingkat kekayaan daerah yang dimiliki, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018.

Tingkat kekayaan daerah menunjukkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki daerah tersebut yang ditunjukkan dengan besarnya PAD dibagi dengan total pendapatan. Hal ini berarti semakin besar tingkat kekayaan yang dimiliki oleh tiap daerah, semakin baik pula kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemda dengan PAD yang tinggi diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016) yang menghasilkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. tetapi penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilawati (2016) dan Veriza (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.9.3. Hubungan Ketergantungan Daerah Terhadap Skor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ketergantungan daerah dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan antara DAU dengan total pendapatan. Dimana menghasilkan uji regresi untuk hipotesis ketiga yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya tingkat ketergantungan daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se Pulau Sumatera tahun anggaran 2018.

Tingkat ketergantungan daerah adalah besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam kegiatan pemerintahannya, dimana seharusnya semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah

daerah kabupaten/kota. Tetapi pada penelitian ini ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja, hal itu disebabkan kemungkinan dalam penilaian kinerja menteri dalam negeri tidak hanya memperhatikan aspek kinerja keuangan saja, tetapi aspek kinerja non keuangan pula, Sudarsana (2010).

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sudarsana (2010), yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi penelitian ini tidak mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2016) dimana penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.9.4. Hubungan Belanja Modal Terhadap Skor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Belanja modal dalam penelitian ini dihitung atau diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Dimana menghasilkan uji regresi bahwa hipotesis keempat yaitu belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya belanja modal tidak mempengaruhi skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018.

Belanja modal tidak mempengaruhi skor kinerja pemerintah daerah, Sudarsana (2013) menyatakan bahwa kejadian tersebut dikarenakan terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah yang memiliki akses langsung terhadap belanja modal dengan pihak masyarakat. Adanya asimetri informasi tersebut memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah. Belanja modal seharusnya mampu menunjukkan adanya pengeluaran yang produktif dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa belanja modal belum dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini tidak didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Harumiati dan Payamta (2014) dimana penelitiannya menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang berarti bahwa semakin besar belanja modal semakin tinggi atau baik skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman (2019) dan Sudarsana (2013) yang menyatakan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang berarti hipotesis awal dari penelitian ini ditolak.

3.9.5. Hubungan *Leverage* Terhadap Skor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan total utang dengan total aset. Hasil dari uji regresi menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *leverage* tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018.

Leverage merupakan kemampuan daerah dalam membayar utangnya, dimana semakin kecil *leverage* menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota akan menjadi baik. Tetapi pada penelitian ini *leverage* tidak mempengaruhi skor kinerja pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan bahwa skor kinerja pemerintah daerah tidak diindikasikan dari pengelolaan liabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, melainkan diindikasikan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana terbukti pada hipotesis kedua yaitu semakin tinggi kekayaan daerah semakin baik kinerja yang dihasilkan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yang menunjukkan

bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan leverage terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah dengan studi empiris pada Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa hasil atas data penelitian yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan batas signifikansi 5%, sedangkan variabel ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2018.

4.2. Keterbatasan Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini, hanya dapat menjelaskan sebesar 4,6% jika dilihat dari nilai *adjusted R square*. Hal itu berarti bahwa sebesar 95,6% dalam artian sisanya, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini hanya melakukan penelitian pada kabupaten/kota se-Pulau Sumatera pada tahun anggaran 2018. Tentunya hanya sedikit mewakili dalam menyimpulkan kinerja keuangan pemerintah daerah se-Indonesia. Tahun data penelitian yang digunakan hanya menggunakan 1 tahun yaitu tahun 2018, peneliti berusaha untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jangka waktu yang lebih panjang, namun terdapat data yang tidak tersedia sehingga menyebabkan hanya menggunakan 1 tahun.

4.3. Saran

Penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menggunakan variabel-variabel lain yang lebih beragam. Misalnya dalam segi pertumbuhan, ataupun bagaimana karakteristik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dan variabel-variabel lain yang menarik untuk diteliti. Memperluas cakupan dalam pengambilan sampel, menggunakan beberapa pulau atau bahkan menggunakan sampel kabupaten dan kota se Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20”*, Edisi 6. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati dan Dawn C. P. 2010. *“Dasar-dasar Ekonometrika”*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Harumiati dan Payamta, 2014. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011”*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.
- <http://otda.kemendagri.go.id/>.
- Mahsun, 2006. *“Pengukuran Kinerja Sektor Publik”*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Lestari, Rahayu, dan Yudi, 2019. *“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi)*.
- Lukman dan Bawono, 2019. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”(Studi Empiris di Kabupaten/Kota se Pulau Jawa Tahun Anggaran 2015-2016)*.
- Mustikarini, dan Fitriasisari. 2012. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007)*.
- Noviyanti dan Kiswanto. 2016. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”*. Accounting Analysis Journal 5 (1) (2016).
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

- Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2005 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Puspa Sari Indah, 2016. *“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)*. JOM Fekon Vol.3 No.1
- Septiani dan Rahayu. 2018. *“The Impact Of Local Government Charactersitics And Audit Findings Of Bpk To Local Government Performance” (Study On Districs And Cities In South Sulawesi Province During 2012-2015)*.
- Sudarsana dan Rahardjo, 2013. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia)*.
- Susilawati Ponco, 2016. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia” (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Veriza Nanda, 2017. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” (Studi Kasus di Kabupaten/Kota se-Sumatera Tahun Anggaran 2013-2014)*.
- Widiarti dan Bawono, 2018. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Temuan BPK terhadap Kinerja Pemerintah daerah” (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota se Pulau Jawa tahun 2015-2016)*.